



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ABDUL JOUSEF SITEPU**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
3. NHK : **954739**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>700.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/5 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>641.340.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V M/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT A/T SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2020, HADIAH Rp. 7.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA R15M Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA RUSH GR SPORT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 292.340.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.000.000</b>
<b>D. SURAT BERTAGIH</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>500.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.342.840.000</b>



III. HUTANG

Rp. 76.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.266.340.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.